

MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI MELALUI PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI

Aris Budiman

★ Latar Belakang

Reformasi yang bergulir telah melahirkan sistem pemerintahan Indonesia yang lebih demokratis dan lebih memberikan jaminan akan terbentuknya suatu masyarakat sipil atau masyarakat yang madani, yaitu suatu masyarakat modern dan sejahtera yang dibangun berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Masyarakat sipil atau madani memberikan penghargaan kepada hak-hak asasi individu, penghargaan kepada kaum minoritas dan sikap yang toleran terhadap berbagai perbedaan (khususnya perbedaan agama dan pandangan politik) sebagai wujud kesadaran akan majemuknya bangsa, penghargaan kepada proses-proses hukum, dan berbagai sikap dan perilaku yang mencerminkan suatu masyarakat madani yang beradab (Suparlan, 2000).

Perubahan orientasi pemerintahan Indonesia yang lebih demokratis tersebut (Tjokroamidjojo, 2000 : 128-136), akan berdampak pada birokrasi pemerintahan yang lebih

mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government dan good governance*), yaitu sistem pemerintahan yang menuntut akuntabilitas para birokratnya (*accountability*), adanya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan (*transparency*), adanya keterbukaan pada perumusan kebijakan-kebijakan (*openess*), adanya jaminan kepastian hukum (*rule of law*), perlakuan yang adil dan adanya kesetaraan (*fairness in a level playing field*).

Sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, Polri dituntut juga untuk melakukan perubahan-perubahan yang mencerminkan suatu satuan kepolisian dari suatu negara yang demokratis. Satuan kepolisian yang lebih protagonis daripada antagonis¹ (Rahardjo, 1999). Satuan kepolisian yang menjaga nilai-nilai sipil (*the guardian of civil values*) melalui pekerjaannya yang tanggap segera (*responsiveness*) terhadap pelayanan warganya, mengedepankan keterbukaan (*openess*) dan lebih akuntabel (*accountability*) dalam kegiatan operasionalnya (Ismail, 2007 12-13).

Menjadikan Polri yang protagonis dan sekaligus sebagai penjaga nilai-nilai sipil merupakan tanggung jawab pimpinan Polri berjenjang sampai ke lapis pelaksana tugas kepolisian di lapangan. Pimpinan Polri telah merespons perubahan-perubahan tersebut dengan mencanangkan langkah-langkah perubahan yang meliputi aspek-aspek struktural (yang berkaitan dengan organisasi tata kerja kerja kepolisian), instrumental (yang berkaitan dengan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi dan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi), dan kultural (yang berkaitan dengan sumber daya manusia dari aspek sikap dan perilaku petugas Polri).

Disisi lain, perubahan lingkungan yang bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional; yang menyangkut aspek

¹ Protagonis mencerminkan satuan kepolisian yang terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat dan bersedia mengkomodifikasinya dalam tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan kepolisian. Kebalikannya adalah antagonis.

politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan hukum, berdampak pada kualitas kejahatan dengan berbagai modus operandi (MO) yang semakin beragam dan canggih (*hacking* misalnya yang mampu merusak dan membobol sistem keamanan instansi pemerintahan maupun lembaga-lembaga keuangan di berbagai belahan dunia). Tidak kalah pentingnya adalah kejahatan-kejahatan yang langsung menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat seperti terorisme, narkoba, korupsi dan berbagai kejahatan terhadap kekayaan negara (*illegal logging, illegal mining, illegal fishing*) dan berbagai konflik komunal di berbagai wilayah Indonesia yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan RI.

Kesemua hal tersebut menuntut petugas-petugas Polri yang profesional dengan penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai sipil dalam melaksanakan tugasnya. Para petugas Polri tersebut dituntut untuk mahir, bermoral dan patuh hukum dalam menegakkan hukum. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa dalam tugas penegakan hukum yang bersifat represif (yang terkadang dengan upaya paksa sampai kepada penggunaan kekerasan), para petugas Polri tetap dituntut untuk memperhatikan nilai-nilai moralitas masyarakat dan hukum agar tidak terjebak pada penyalah-gunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang mengarah kepada penggunaan kekuasaan dan kekerasan secara berlebihan (*excessive use of power and police brutality*).

Untuk mendapatkan petugas-petugas Polri yang profesional dan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai sipil (dalam hal ini diperlukan *to change the mind set of police officers*, perubahan paradigma dalam berpikir dari tradisional menjadi polisi sipil profesional dan modern), para pimpinan Polri secara berjenjang dari lapis manajer terendah sampai manajer puncak, dituntut untuk mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi aspek-aspek pendidikan dan latihan sampai kepada penugasan para petugas Polri bawahannya. Dengan kata lain para manager kepolisian dituntut untuk memiliki

kemampuan manajerial dalam melakukan pembinaan dan dalam memberikan penugasan-penugasan kepada para petugas lapangan bawahannya sesuai dengan kemampuan profesional yang dimilikinya. Sehingga melalui pembinaan dan penugasan ini akan selalu tersedia petugas lapangan Polri yang profesional dalam melaksanakan tugas perlindungan, pelayanan, pengayoman dan penegakkan hukum dalam tatanan negara yang demokratis.

Globalisasi dan Dampaknya Bagi Masyarakat Majemuk Indonesia

Martin Albrow dan Elizabeth King merumuskan globalisasi sebagai "keseluruhan proses dimana masyarakat di dunia bergabung dalam sebuah masyarakat dunia tunggal, yaitu *global society*" dan sebagai "intensifikasi hubungan sosial berskala dunia yang memungkinkan keterkaitan masyarakat lokal dengan kejadian-kejadian di bagian-bagian dunia lainnya, atau sebaliknya". Sementara Aart Scholte menyatakan bahwa konsep globalisasi menggambarkan lima macam fenomena, yaitu sebagai sebuah *internasionalisasi*, sebagai sebuah *liberalisasi*, sebagai *universalisasi*, sebagai *westernisasi*, dan sebagai *deteritorialisasi*. Robert Keohane dan Joseph Nye menggambarkannya sebagai 'situasi dunia yang melibatkan jaringan-jaringan interdependensi pada jarak yang multikontinental'. Saling ketergantungan tersebut dalam bidang ekonomi, budaya, masyarakat, lingkungan, dan militer (dalam Bantarto, 2007).

Sebagai sebuah proses, fungsi maupun struktur, globalisasi telah merubah secara fundamental tatanan ekonomi dan politik dunia, tidak hanya mengubah secara fundamental cara masyarakat dunia memandang persoalan-persoalan yang muncul, tetapi juga cara-cara mereka menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Disamping hal tersebut, globalisasi juga menciptakan berbagai

peluang baru maupun berbagai hambatan baru dalam hubungan antar negara.

Sebagai struktur, globalisasi melibatkan perubahan-perubahan kualitatif dalam hubungan antar komponen-komponen dari sistem dunia. Komponen-komponen ini sekaligus sebagai faktor yang selalu dipertukarkan oleh anggota-anggota dari sistem dunia itu sendiri, seperti barang (*goods*), kekuatan (*power*), informasi (*information*), dan nilai-nilai (*values*). Interaksi antar negara dengan melibatkan faktor-faktor tersebut akan membentuk semacam *threads* yang membentang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan membentuk semacam jaringan yang bukan hanya *loosely woven*, tetapi juga *tightly meshed*. Perspektif ini kemudian melahirkan sistem dunia yang teratur (*organized*) karena kemampuan negara-negara mengkaitkan faktor-faktor diatas dalam struktur dan pola-pola yang *manageable*, dan ketidakteraturan (*disorganized*) karena melibatkan hubungan antar negara yang antagonistik dan *chaotic* (Bantarto, 2007).

Sebagai masyarakat yang majemuk² yang terdiri dari masyarakat-masyarakat suku bangsa yang besar maupun yang kecil, yang secara bersama-sama mewujudkan diri sebagai satu bangsa (*nation*), yaitu bangsa Indonesia (Suparlan, 2000), tidak terlepas dari pengaruh globalisasi tersebut. Nilai-nilai baru yang bersifat global yang cenderung berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi dengan kecenderungan penguasaan kapital atau modal secara intens akan mempengaruhi nilai-nilai dalam kebudayaan³

² Konsep masyarakat majemuk (*plural society*) mengacu pada tulisan Furnival (dalam Suparlan, 1981), yang mengidentifikasi masyarakat jajahan Hindia Belanda sebagai sebuah masyarakat majemuk. Yaitu, sebuah masyarakat yang terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok, yang berbaaur tetapi tidak menjadi satu. Masing-masing kelompok mempunyai agama, kebudayaan dan bahasa, serta cita-cita dan cara-cara hidup mereka masing-masing. Sebagai individu mereka itu saling bertemu, tetapi hanya di pasar. Masyarakat seperti ini terdiri atas bagian-bagian yang merupakan komuniti-komuniti yang hidup saling berdampingan dalam sebuah satuan politik, tetapi saling terpisah atau tidak merupakan sebuah kesatuan. Mereka itu merupakan sebuah masyarakat karena dipersatukan secara paksa, tidak karena secara sukarela.

³ Kebudayaan merupakan blue print bagi kehidupan manusia atau sebagai pedoman menyeluruh bagi kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ini (blueprint atau pedoman hidup menyeluruh),

sukubangsa atau masyarakat Indonesia. Penguasaan modal (terutama oleh perusahaan-perusahaan multinasional) akan merambah masuk dalam sistem-sistem kehidupan masyarakat Indonesia, dan bahkan bisa memaksakan suatu kebijakan kepada pemerintahan Indonesia.

Sistem nasional yang acuannya kepada Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan landasan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, tidak mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan maksimal kepada masyarakat Indonesia karena kelemahan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ada lebih merupakan suatu kompromi politik yang menggunakan kekuatan uang, kekuatan sosial, dan kekuatan kekuasaan (*power*) sebagaimana prinsip-prinsip dalam sistem pasar atau tempat-tempat umum⁴. Dengan prinsip-prinsip ini maka dengan mudah ditebak pemerintahan akan mampu ditekan berbagai kekuatan asing (yang dapat bekerjasama kekuatan lokal) untuk merumuskan kebijakan yang menguntungkan mereka, yang rentan menimbulkan perlawanan kekerasan (Bandem, 2006).

kebudayaan dilihat sebagai konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode yang diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat yang menjadi pemiliknya. Kebudayaan dengan demikian merupakan sistem-sistem acuan yang ada pada berbagai tingkat pengetahuan dan kesadaran, dan bukan pada tingkat gejala yaitu pada tingkat kelakuan-kelakuan atau hasil dari kelakuan-kelakuan. Sistem-sistem acuan, konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode yang digunakan secara selektif sebagai acuan oleh para pemilik kebudayaan dalam menghadapi lingkungannya, yaitu digunakan untuk menginterpretasi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya sebagai manusia. Pemilihan secara selektif tersebut dilakukan dengan berdasarkan kepada pertimbangan oleh pelaku mengenai konsep atau metode atau teori mana yang paling cocok atau yang terbaik yang dapat digunakan sebagai acuan interpretasi dan mewujudkan tindakan-tindakan (Suparlan, 1999).

Kebudayaan sebagai sebuah blueprint atau pedoman-pedoman dalam kehidupan manusia terwujud melalui pranata-pranata (*institutions*) yang dipunyai oleh masyarakat tersebut. Pranata didefinisikan sebagai sebuah sistem antar hubungan norma-norma dan peranan-peranan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bagi kehidupan yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian sebenarnya norma-norma merupakan hal yang mendasar dan utama atau menjadi inti dari suatu kebudayaan (Suparlan, 1998).

⁴ Patokan etika dan moral yang berlaku dalam kebudayaan tempat-tempat umum adalah prinsip-prinsip yang egaliter (adanya kesamaan derajat) dan kemampuan tawar menawar barang, uang dan jasa. Prinsip tawar menawar dilakukan dengan menggunakan kekuatan uang, kekuatan fisik, dan kekuatan sosial (Suparlan, 1998).

Diakui bahwa semua itu merupakan masa transisi masyarakat Indonesia menuju masyarakat sipil (*civil society*) yang demokratis. Masyarakat Indonesia mengalami masa transisi simultan dari masyarakat agraris tradisional ke masyarakat industri modern dengan laju perkembangan teknologi yang serba cepat dan tidak seimbang dengan perkembangan mental. Kemajuan iptek di samping bermanfaat bagi umat manusia juga berdampak terhadap meningkatnya kualitas dan bentuk kejahatan yang berlingkup lokal, nasional maupun internasional. Penggunaan komputer yang makin meluas dalam kehidupan masyarakat mendorong meningkatnya kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarannya.

Transisi lainnya ialah transisi budaya etnis kedaerahan kearah masyarakat dengan budaya nasional kebangsaan bahkan berlanjut kepada budaya global. Proses transisi ini berlangsung dalam proses interaksi sosial yang intensif yang dalam hal-hal tertentu masih menimbulkan peluang terjadinya kasus-kasus konflik nilai, pertikaian etnis, antar sukubangsa, antar agama dan rasial serta dapat mengakibatkan gangguan keamanan berupa perkelahian massal, perusakan dan atau pembakaran. Hal tersebut dipacu dengan adanya perebutan sumber daya maupun harga diri yang primordial coraknya. Konflik tersebut apabila belum mencapai puncaknya maupun masih tahap awal sangat sulit untuk diredakan. Biasanya kelompok yang bertikai akan saling melihat korban dari pihak lawannya masing-masing dengan semangat untuk menghancurkan jati diri pihak lawannya (Chrysnanda, 2006).

Dalam masa transisi sekarang ini bangsa Indonesia belum sepenuhnya menjalani kehidupan demokrasi, karena di samping yang produktif, yang banyak adalah tukang-tukang palak, atau preman. Tukang palak atau preman dapat dikatakan sebagai benalu masyarakat, yang secara langsung atau tidak langsung tindakan-tindakan mereka itu menghancurkan tatanan demokrasi.

Di samping itu berbagai bentuk konflik individual, kelompok, antar kampung atau desa dan antar komunitas yang berbeda suku bangsa dan agama menjadi semakin menjadi-jadi. Konflik antar individu bukan hanya saling menghancurkan secara individual tetapi menghancurkan rumah-rumah dan harta benda (seperti peristiwa perkelahian massal di Manggarai dan Matraman Jakarta), kampung atau desa (seperti di Cilacap, Brebes, Losari dan Indramayu), menjadi konflik antar-sukubangsa (seperti yang terjadi di Sambas, Sampit, Ambon dan Maluku), yang menghancurkan seluruh kehidupan komunitas dan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat yang majemuk. Atau konflik antara-kelompok di daerah propinsi dengan pemerintahan nasional, di mana yang menjadi korban adalah warga dan komunitas yang dianggap bukan asli setempat, seperti terjadi di Aceh dan Irian Jaya (Papua). Demikian pula halnya dengan kegiatan-kegiatan terorisme yang mengatasnamakan kebenaran dan pemahaman sempit terhadap ajaran-ajaran agama untuk melakukan serangkaian kegiatan dengan kekerasan (bom bunuh diri, pembunuhan, perampokan).

Konflik-konflik yang terjadi tersebut, oleh Wirutomo (2007) dinyatakan sebagai gejala sosiologis fundamental sebagai akibat dari :

- a. Pergeseran struktur kekuasaan dari *otokrasi* menjadi *oligarki*. Struktur kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (*demos*) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (kewenangan, uang, hukum, informasi). Demikian pula krisis *representative democracy* (preman pasar yang sama sekali tidak memiliki kecakapan menjadi perwakilan rakyat di legislatif).
- b. Kebencian sosial yang tersembunyi (*socio-cultural animosity*) yang bersumber dari perbedaan ciri budaya⁵ dan perbedaan

⁵ Suparlan (1999a) menyatakannya sebagai primordialitas (ciri-ciri askriptif - diperoleh begitu saja dari seorang anggota sukubangsa) yang menjadi batas sosial dengan sukubangsa lainnya dan menjadi landasan berkembangnya stereotip (pandangan yang merupakan konsep subyektif

nasib pada sejarah masa lalu sehingga terkandung unsur balas dendam. Konflik tersembunyi bersifat laten karena adanya sosialisasi kebencian melalui seluruh pranata sosialisasi (*agent of socialization*) di masyarakat (mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi massa, organisasi politik). Konflik yang terjadi tidak hanya antar pendukung Orba dan Reformasi, tetapi meluas antar suku, agama, kelas sosial, kampung, dan lebih sering konflik horizontal daripada vertikal. Konflik tidak menjadi korektif tetapi destruktif (tidak fungsional tetapi dis-fungsional).

c. Merebaknya budaya pengangguran yang secara sosiologis tidak memiliki status sosial yang jelas (*statusless*) sehingga tidak memiliki standar pola perilaku dan cenderung melepaskan tanggung jawab sosial. Dalam kondisi ekstrim, penganggur justru menginginkan ketidak-teraturan sosial atau bahkan kekacauan sosial (*social disorder atau chaos*).

Kebijakan dan Strategi Polmas

Community Policing adalah bentuk pemolisian sipil⁶ untuk

sukubangsa terhadap sukubangsa lainnya). Stereotip dapat berkembang menjadi prasangka (dugaan yang diyakini kebenarannya terhadap sukubangsa lainnya. Misalnya orang Cina perusak ekonomi karena stereotip yang dikembangkan orang Cina sebagai penguasa kegiatan ekonomi Indonesia).

⁶ Prof. Satjipto Rahardjo (2005) menyatakan pemolisian dengan paradigma baru memuat suatu yang kompleks : nilai, sikap, dan perilaku yang menciptakan sindrom merawat (*care*), yang merupakan karakteristik Polisi sipil yang lebih cenderung "*caring the people*" daripada "*the use of force*" seperti :

- a. *Humane policing*
- b. *Decriminalizing*
- c. *Turning to others not to the police*
- d. *Exercise more social control on their (people) own*
- e. *Decentralized mode of social control*
- f. *People immediately involved*
- g. *To draw upon network of family friends*
- h. *The police moving away from militaristic configuration, engage in serious heart to heart communication with the entire community*
- i. *Unilateral control by police replaced by collective responsibility for social and community control of police*
- j. *De-emphasis of force, the re-emphasis of personal moral responsibility and development of concerned*

menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan tindakan-tindakan :

- a. Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat;
- b. Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas;
- c. Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*);
- d. Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penerapannya dengan mengedepankan perbaikan dan penjagaan hubungan antara Polisi dengan warga komuniti sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Hubungan Polisi dengan warga komuniti dibangun melalui komunikasi dari hati ke hati dan pemikiran untuk memahami berbagai masalah sosial yang terjadi maupun dalam membahas masalah yang bersifat lokal dan adat istiadat masyarakat suku bangsa setempat.

Dalam model *community policing*, posisi Polisi tidaklah selamanya sebagai mitra, tetapi selalu berpindah sesuai dengan konteks masalah dan masyarakat/personal yang dihadapinya. Model itu dapat dilihat secara fleksibel dengan posisi polisi sebagai;

- a. Setara antara Polisi dengan warga komuniti dalam membangun kemitraan dimana Polisi bersama-sama dengan warga dalam

neighborhoods

- k. *The police accept the role of ombudsman of the weak, ignorant confused, frustated, unemployed, sick, hungry, lonely, hopeless*
- l. *The police grasp the human suffering*
- m. *Weakening the police force*
- n. *Systematic depolicing.*

- upaya untuk mencari solusi dalam menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat;
- b. Dibawah, yang menunjukkan bahwa polisi berupaya mendengarkan dan memahami keluh kesah warga komuniti akan kebutuhan rasa aman warga komuniti yang dilayaninya, dan;
 - c. Diatas yaitu pada saat polisi bertindak sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas penegakkan hukum-hukum negara.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, Mardjono (2006) menjelaskan tentang pekerjaan kepolisian dapat dinamakan "pengelolaan konflik", baik dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) maupun dalam pemecahan masalah (*problem solving*). Kedua jenis pengelolaan konflik ini memang berbeda, dan karena itu dinyatakan bahwa wajah polisi dapat "angker" (dalam menegakkan hukum), tetapi dapat pula "tersenyum" (dalam berusaha mendamaikan dengan memecahkan masalah). Ada berbagai jenis "konflik" dan juga berbagai peran polisi dalam memecahkan masalah konflik, misalnya sebagai "mediator" (perantara) ataupun "negosiator"

Dalam penegakkan hukum (dengan mempergunakan kewenangannya menangkap, menahan, menggeledah dan menyita) polisi mengelola "konflik" (warga yang melanggar hukum) dengan kekerasan (*force*, bukan *violence*). Disini polisi menunjukkan wajahnya yang "angker". Tetapi dalam kegiatan pemecahan masalah, wajah yang diperlihatkan polisi adalah wajah yang tersenyum. Disini terjadi pengelolaan "konflik" (misalnya karena polarisasi nilai atau komunikasi antar budaya yang berbeda atau karena masalah ketidaksetaraan dan rasa ketidakadilan) oleh polisi, yang bertujuan membatasi dan menghindari kekerasan (dengan mendorong a.l. perubahan perilaku atau persetujuan

perdamaian atau dengan membangun hubungan baru). Polmas dapat mengelola konflik dalam kedua bentuk di atas, baik dengan kekerasan (wajah angker) maupun tidak (wajah tersenyum). Namun selalu yang harus dikedepankan adalah "keinginan" atau "masukan" masyarakat dan dikelola bersama dengan masyarakat.

Mewujudkan Profesionalisme Polri

Mewujudkan profesionalisme Polri seperti telah dikemukakan terdahulu akan berkaitan dengan perwujudan satuan kepolisian sipil dalam suatu negara yang demokratis, yang implementasinya dilakukan melalui program strategi perpolisian masyarakat (polmas), sebagaimana Keputusan Kapolri Nomor: Kep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Strategi Perpolisian Masyarakat. Arah profesionalisme Polri karenanya akan berpedoman kepada prinsip-prinsip *transparansi dan akuntabilitas, partisipasi dan kesetaraan, personalisasi, penugasan permanen, desentralisasi dan otonomisasi*.

Untuk mencapai hal tersebut, pimpinan Polri telah mencanangkan langkah-langkah perubahan pada aspek struktural, instrumental, dan kultural (sebagaimana telah dijelaskan diatas). Pimpinan Polri beranggapan bahwa pada aspek struktural dan instrumental telah cukup mampu untuk merespon tantangan tugas yang dihadapi saat ini. Tetapi berkaitan dengan masalah kultural, masih banyak kendala yang dihadapi karena berkaitan dengan kebudayaan organisasi kepolisian yang dimiliki para petugas-petugas kepolisian (aspek sikap dan perilaku petugas Polri).

Untuk mewujudkan profesionalisme tersebut, strategi yang perlu dilakukan Polri adalah melalui :

a. Pendidikan dan Pelatihan Polri

- 1) Unifikasi Lembaga-lembaga Pendidikan Polri sebaiknya dilakukan dengan menempatkannya dibawah satu lembaga. Misalnya Lemdiklat membawahi semua lembaga pendidikan Polri untuk memudahkan menyusun kurikulum yang berkelanjutan dari pendidikan terendah sampai pendidikan tertinggi, dan dalam menetapkan tenaga pengajar yang handal;
- 2) Perbaiki dalam sistem perekrutan, pelatihan, termasuk didalamnya dalam pemilihan para instruktur atau tenaga pendidik.

b. Sistem Pembinaan Karier Polri

Memisahkan sikap-sikap profesional yang *impersonal* dengan sikap-sikap pribadi yang bersifat *personal*, yang berdampak pada sikap *like/dislike* dalam penugasan petugas kepolisian di tingkat managerial sampai petugas lapangan kepolisian. Pembinaan karier yang diharapkan untuk menghasilkan petugas-petugas kepolisian yang kompeten dilakukan melalui:

- 1) Adanya satu sistem baku yang mengatur pembinaan karier personil Polri yang didasarkan atas *merit system* untuk menempatkan personil-personil Polri yang mumpuni atau kompeten untuk memimpin jajaran Polri;
- 2) Sistem mutasi dan promosi yang dilakukan memang menempatkan personil-personil Polri yang sesuai dengan kapabilitas dan akuntabilitas yang bersangkutan;
- 3) Sistem *reward and punishment* dilakukan terhadap personil-personil Polri yang memang pantas untuk menerimanya;
- 4) Penempatan tugas para petugas Polri berdasarkan kemampuan dan disertai dengan *reward* yang jelas.

c. Organisasi Polri yang lebih kaya fungsi daripada kaya struktur

Pekerjaan kepolisian adalah pekerjaan profesi yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mendukung pelaksanaan tugas dari para petugas kepolisiannya. Karena sifat tugas yang membutuhkan keahlian (olah fisik dan olah fikir), maka akan menjadi sulit apabila organisasi Polri merupakan organisasi yang birokratis dengan banyaknya jenjang jabatan struktural (termasuk jenjang pangkat yang terlalu panjang seperti seorang militer).

d. Desentralisasi dan otonomisasi

Berkaitan dengan point c diatas, maka kewenangan-kewenangan di tingkat pusat lebih didesentralisasikan kepada satuan-satuan kewilayahan sehingga satuan-satuan kewilayahan otonom dalam melaksanakan tugas. Polda telah dijadikan satuan induk penuh, maka sebenarnya semua kewenangan di tingkat mabas harus mampu dilaksanakan oleh Polda, seperti pengangkatan jabatan-jabatan managerial di bawah Kapolda menjadi kewenangan Kapolda.

Penutup

Memperhatikan uraian diatas, maka sebenarnya profesionalisme Polri terwujud dalam sikap dan tindakan kepolisian yang profesional yang dilakukan oleh para petugas Polri pada saat melaksanakan tugas pelayanan, pengayoman dan penegakan hukum. Untuk itu diperlukan suatu model kemampuan profesional para petugas Polri yang selaras dengan masyarakat madani atau sipil yang akan dicapai oleh pemerintahan negara RI yang demokratis. Profesionalisme yang dibangun untuk mewujudkan polisi yang menghargai nilai-nilai sipil yang mampu

melaksanakan tugas kepolisian dalam perlindungan, pelayanan, pengayoman, dan penegakkan hukum yang selaras dengan kebudayaan masyarakat-masyarakat Indonesia.

Daftar Kepustakaan

Bandem, I Made, 2006.

Menuju Kebangkitan Global Kebudayaan Indonesia (Peran Kebudayaan Dalam Peneguhan Ketahanan Nasional). Orasi Ilmiah Pada HUT ke-41 Lemhannas RI. Jakarta. Tanpa Penerbit.

Bantarto, Bandoro, 2007.

Kajian Pengaruh Globalisasi Terhadap Kamdagri. Bahan Pelajaran Sespati Polri Dikreg ke-12. Lembang, Sespim Polri.

Chrysnanda, DL, 2006

Implementasi Polmas Pada Tingkat Polres dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Naskah Akademik Perorangan (Naskap) Sespim Polri. Lembang, Sespim Polri.

Ismail, Chaeruddin, 2007a.

Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Polri. Lembang, Sespim Polri. Perubahan Sikap dan Perilaku Polri Dalam Rangka Ikut Mendukung Terciptanya Masyarakat Demokrasi. Lembang, Sespim Polri. 2007b

Djamin, Awaluddin, 2000

Menuju Polri Mandiri yang Profesional : Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat. Cetakan ke-dua. Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono. 2006

Polmas Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Implementasi Penegakkan Hukum. Makalah Seminar Sespim Polri Dikreg ke-42 'Implementasi Strategi

Aris Budiman - Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri Melalui Peningkatan Profesionalisme Polri

Perpolisian Masyarakat Dalam Upaya Memelihara Keamanan dan Ketertiban Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri'

Rahardjo, Satjipto, 2000.

Polisi Sipil. Jakarta, Gramedia.

Tentang *Community Policing*. Makalah Seminar 'Polisi antara Harapan dan Kenyataan'. Hotel Borobudur. Jakarta. Tanpa Penerbit. 2005

Suparlan, Parsudi.

Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah. Makalah Seminar 'Hukum Nasional VII'. BPHN. Departemen Kehakiman RI. Jakarta. Tanpa Penerbit. 1999

Kekerasan dan Potensi Disintegrasi Masyarakat. Makalah Seminar 'Disintegrasi Masyarakat Ditinjau Dari Segi Antopologi Budaya, Sosiologi Hukum dan Psikologi Massa'. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jakarta. Tanpa Penerbit. 1999a

Hak Budaya Komuniti dan Integritas Kebangsaan. Makalah Diskusi 'Gandhi Afternoon'. Jakarta, Tanpa Penerbit. 2000

Tjokroamidjojo, H. Bintoro, 2002.

Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.

Wirutomo, Paulus, 2007.

Kajian Lingkungan Strategis. Bahan Pelajaran Sespati Polri : Kajian Perkembangan Sosial. Lembang, Sespim Polri.

DOKUMEN

Keputusan Kapolri Nomor : Kep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Strategi Perpolisian Masyarakat

KONTRIBUTOR

1. Aris Budiman

Dosen PTIK; Dosen S2 KIK-UI, Mahasiswa S3 KIK UI, Pamen Bareskrim Mabes Polri.

2. Chryshnanda Dwilaksana

Dosen PTIK; Dosen S2 KIK-UI, dan Kasubdit Dikyasa Polda Metro Jaya

3. Parsudi Suparlan

Guru Besar Antropologi UI; Guru Besar S2 dan S3 pada Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia; Guru Besar PTIK

4. Sarlito Wirawan Sarwono

Guru Besar Psikologi UI; Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia; Guru Besar PTIK, dan S2 KIK-UI